

IMPLEMENTASI E-PROCUREMENT DI UNIVERSITAS DIPONEGORO

Oleh:

Ndikron, Margaretha Suryaningsih, R Slamet Santoso

**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 12693
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465404
Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id
Email: ndikron@rocketmail.com

ABSTRACT

The massive case of corruption in procurement of goods and services encourage the government to publish new policy named e-procurement .E-procurement considered the government able to overcome the problems in procurement as cases of corruption, Diponegoro University as institutions college also implement e-procurement in the need procurement of goods and services, but in the application faces obstacles and makes the implementation not be optimal. Problems underlying as deficiency human resources, incompleteness supporting facilities, as well as lack of readiness the target group is the major cause. This report is written with research methodology qualitative and description aimed at know the state of the implementation of e-procurement and know by factors in support and inhibitors of of e-procurement.

The result of this research when viewed from the effectiveness of the implementation not yet optimal because it is still the low understanding the target group and the factors barrier namely the resources and bureaucratic structure of the actor e-procurement policy at the Diponegoro University.

Based on the outcome of this research recommended to do improve the quality of related to the procurement of goods and services by means of .Informed to the target group about actor implementor, do maintenance on the software and hardware at regular intervals , inviting people to apply supervision , improvement of infrastructure , do recruitmen staff as well as fix jobdesk staff.

Keywords: E-Procurement, Implementation, obstacle factors

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai negara berkembang Indonesia terus berupaya melakukan pembenahan - pembenahan diberbagai sektor, mulai dari sektor pendidikan, hukum, politik maupun pemerintahan. Pembenahan - pembenahan yang dilakukan ini tidak lain adalah sebagai sebuah tuntutan guna mengikuti perkembangan zaman yang kian hari kian dinamis. Semakin majunya sebuah zaman juga pada akhirnya membentuk manusia – manusia yang kritis terhadap kebutuhannya untuk mendapatkan informasi dan pelayanan dari pemerintah secara cepat, tepat dan mudah.

Tuntutan majunya teknologi tersebut coba diakomodir pemerintah dengan menciptakan suatu sistem pemerintahan berbasis elektronik yang disebut sebagai e-Government. Kemudian dari berkembangnya e-Government ini tercipta pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang dinamakan e-Procurement.

Lahirnya kebijakan e-Procurement didasari oleh tingginya kasus penanganan korupsi pada jenis perkara pengadaan barang dan jasa. Berdasarkan data dari laporan tahunan KPK, sebelum diberlakukanya e-Procurement yakni pada tahun 2007 hingga 2010 kasus korupsi pada pengadaan barang dan jasa adalah yang tertinggi dengan 64 kasus. E-Procurement sendiri baru dijalankan pada tahun 2011 sesuai dengan Pasal 131 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang mewajibkan melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik untuk sebagian/seluruh paket-paket pekerjaan pada Tahun Anggaran 2011.

Selain itu menurut LSM antikorupsi Indonesia Corruption Watch menyoroti ada 3 permasalahan yang ditemukan dalam implementasi e-Procurement, Pertama menurut ICW adalah persoalan ketidaksiapan personalia, sistem dan infrastruktur. Kedua, adalah persoalan terkait kelemahan hukum administrasi di

Indonesia sehingga pada titik tertentu, sistem "e-procurement" itu dinilai tidak aman karena tidak terjamin rahasianya dan mudah diacak-acak pihak yang tidak bertanggung jawab. Ketiga, adalah meskipun sudah dilakukan secara elektronik namun masih juga ditemukan kejanggalan pengadaan barang dan jasa lewat internet.

Selanjutnya Forum Indonesia Untuk Transparasi Anggaran juga mengatakan bahwa hampir semua proyek pengadaan barang dan jasa terindikasi adanya kecurangan. Modusnya adalah lewat kerjasama panitia pengadaan dengan pihak rekanan untuk membocorkan informasi mengenai pengadaan.

Lokus yang diambil dalam penelitian ini adalah Universitas Diponegoro. Universitas Diponegoro sebagai sebuah perguruan tinggi di Indonesia juga merupakan salah satu institusi yang juga melaksanakan e-Procurement dalam proses pemenuhan pengadaan barang dan jasanya. Permasalahan implementasi e-Procurement di Universitas Diponegoro dari hasil wawancara dengan ketua LPSE yang pertama adalah terkait masalah kekurangan sumber daya manusia, sehingga menyebabkan beban kerja yang menumpuk. Yang kedua menurut mantan ketua LPSE menjabarkan permasalahan e-Procurement yakni kemampuan penyedia jasa menggunakan komputer dan permasalahan fasilitas pendukung seperti jaringan internet dan infrastruktur. Berdasarkan permasalahan – permasalahan tersebut menjadikan landasan terciptanya penelitian tentang implementasi e-Procurement di Universitas Diponegoro

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kondisi implementasi e-Procurement di Universitas Diponegoro
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat

pada implementasi e-Procurement di Universitas Diponegoro

C. Kerangka Teori

C.1 Implementasi Kebijakan

Untuk menilai implementasi kebijakan publik, hal yang perlu diperhatikan adalah mengenai prinsip – prinsip dasar bagi implementasi kebijakan yang efektif. Riant Nugroho (2011:650) mengemukakan bahwa pada dasarnya ada “lima tepat” yang perlu dipenuhi dalam hal keefektifan implementasi kebijakan, meliputi:

1. Ketepatan Kebijakan
1. Ketepatan Pelaksanaan
2. Ketepatan Target
3. Ketepatan Lingkungan
4. Ketepatan Proses

C.2 Model Teori George C. Edward III

Pada model implementasi George C. Edward III implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel sebagai faktor penentu keberhasilan suatu implementasi, meliputi:

1. Komunikasi
2. Sumberdaya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

D. Metode Penelitian

1. Desain Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif bersifat deskriptif untuk menggambarkan kondisi implementasi e-Procurement di Universitas Diponegoro, melalui penelitian ini akan diperoleh informasi mengenai bagaimana implementasi program tersebut melalui berbagai metode seperti wawancara, pengamatan dan pemanfaatan dokumen yang diperoleh dari informan yang tersedia

2. Lokus dan Fokus Penelitian

Lokus penelitian merupakan penetapan tempat atau penelitian dimana penelitian ini dilaksanakan. Dalam

penelitian implementasi e-Procurement di Universitas Diponegoro peneliti mengambil lokus penelitian di ULP dan LPSE Universitas Diponegoro. Sedangkan Fokus penelitian merupakan pemusatan konsentrasi terhadap tujuan penelitian yang sedang dilakukan. Penelitian ini mempunyai fokus yakni tentang kondisi implementasi e-Procurement di Universitas Diponegoro

3. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan sumber dan jenis data yang meliputi:

1. Kata – kata dan tindakan
2. Sumber tertulis
3. Foto, dan
4. Data Statistik

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Wawancara

adalah percakapan dengan maksud tertentu. Dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberi jawaban. Bertujuan mengkonstruksikan mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain lain.

2. Observasi Non Partisipatif (Pasif)

pada observasi non partisipatif ini peneliti tidak ikut terlibat dalam kegiatan observer tetapi hanya melakukan pengamatan secara sepintas pada saat tertentu observer melakukan kegiatan

5. Subjek Penelitian

1. Informan

Dalam penelitian implementasi e-Procurement di Universitas Diponegoro informannya adalah Ketua LPSE Universitas Diponegoro, Ketua ULP Universitas Diponegoro, Staff CV Naritha Primatama, Ketua

- Gabungan pelaksana Konstruksi Indonesia kota Semarang.
2. Teknik Pengambilan Informan
Dalam pengambilan informan menggunakan teknik Purposive Sampling, menurut Pasolong (2012:108) teknik ini merupakan teknik penarikan sample yang digunakan dengan cara sengaja atau menunjuk langsung kepada orang yang dianggap dapat mewakili karakteristik-karakteristik populasi. Pertimbangan penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yaitu pemilihan partisipan yang dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan akan memudahkan peneliti menjelajahi objek penelitian
 6. Analisis interpretasi data
Aktivitas yang dilakukan dalam analisis interpretasi data meliputi :
 1. Reduksi data
Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal - hal yang pokok, memfokuskan pada hal – hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.
 2. Penyajian data
Miles dan Huberman (1984) menyatakan “the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text”. Artinya yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif.
 3. Verifikasi
Aktivitas terakhir dalam analisis interpretasi data menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang

dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti – bukti yang mendukung pada tahap awal, didukung oleh bukti – bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

7. Kualitas data
Untuk menentukan kualitas data yang digunakan dengan cara triangulasi. Triangulasi yang dimaksud adalah triangulasi sumber yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.

PEMBAHASAN

A. Kondisi Implementasi e-Procurement di Universitas Diponegoro

1. Ketepatan Kebijakan

. Ketepatan kebijakan ini dibuat untuk mengetahui *how excellent is the policy* atau seberapa baik kebijakan ini untuk mengatasi masalah – masalah terkait pengadaan barang dan jasa. Dalam ketepatan kebijakan ada 3 variabel, pertama sudahkah kebijakan tersebut dapat menyelesaikan masalah yang ada, kedua sudahkah kebijakan tersebut dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang ada, ketiga apakah kebijakan tersebut dibuat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan yang sesuai dengan karakter kebijakannya.

Kemudian dari hasil wawancara dilapangan diketahui bahwa dengan adanya implementasi e-Procurement mampu mengatasi permasalahan dibidang pengadaan seperti masalah transparansi,

akuntabilitas, masalah akses pasar, persaingan usaha, masalah efisiensi, dan kebutuhan akses yang real time. Selanjutnya diketahui bahwa e-Procurement telah diciptakan sesuai karakter masalah yang ada dibidang pengadaan seperti persekongkolan dalam tender, dan intimidasi kepada aktor lelang. Terakhir e-Procurement diciptakan oleh lembaga yang berwenang dalam pengadaan barang dan jasa yaitu Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP) dibantu Lembaga Sandi Negara dan Badan Pemeriksa Keuangan.

2. Ketepatan Pelaksanaan

Dalam ketepatan pelaksanaan ada satu variabel yaitu ketepatan aktor pelaksana. Dari data yang dikumpulkan dilapangan ditemukan fakta bahwa penyedia jasa kurang memahami dan mengerti siapa – siapa yang menjadi aktor dalam implementasi e-Procurement di Universitas Diponegoro. Para penyedia jasa umumnya hanya mengetahui dan mengerti hanya dua instansi dalam penyelenggaraan e-Procurement ini, yakni ULP dan LPSE padahal lebih dari itu ada PA/KPA, PPK, dan Pokja.

3. Ketepatan Target

Ketepatan target erat kaitanya dengan tujuan yang ingin dicapai dalam sebuah kebijakan, apakah sudah sesuai target sasaran dengan tujuan. Hal itu dapat dilihat dilapangan pada pengimplementasiannya. Riant Nugroho (2011:651) menjabarkan ketepatan target menjadi 3 indikator yaitu (a) Ketepatan target penerima, (b) Target dalam kondisi siap di intervensi, dan (c) Apakah kebijakan ini baru atau memperbaharui kebijakan sebelumnya.

Pertama ketepatan target penerima, berdasarkan dari wawancara dilapangan,

kebijakan e-Procurement di Universitas Diponegoro sudah tepat seperti yang diinginkan namun sayangnya belum optimal. Target penerima kebijakan yaitu penyedia jasa merasa bahwa sistem e-Procurement ini masih banyak celah kekurangan seperti sistem yang error, kemudian gangguan internet sebagai pemicu hal tersebut belumlah optimal.

Kedua, target dalam kondisi siap diintervensi. Dari data dilapangan dijumpai bahwa para penyedia jasa dikatakan mendukung program e-Procurement karena dinilai lebih banyak manfaat.

Ketiga, Kebijakan ini baru atau memperbaharui kebijakan sebelumnya. Kebijakan e-Procurement merupakan kebijakan baru dalam bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan berbasis elektronik, sehingga kebijakan baru ini juga menuntut fasilitas yang berbeda dari yang sebelumnya manual. Diperlukan komputer, server, jaringan internet dan website dalam menjalankanya.

4. Ketepatan Lingkungan

Ketepatan lingkungan menurut Riant Nugroho terbagi atas dua jenis lingkungan yaitu (a) lingkungan endogen yakni keterkaitan lembaga pelaksana dengan lembaga lainya yang terkait. (b) lingkungan eksogen yaitu persepsi publik akan kebijakan dan implementasi kebijakan e-procurement di Universitas Diponegoro.

Dari hasil penelitian dilapangan diketahui bahwa telah terjalin koordinasi antar aktor – aktor yang terlibat dalam implementasi e-Procurement. Selanjutnya mengenai persepsi yang timbul dipublik merasa terbantu dengan kebijakan e-Procurement. Kebijakan e-Procurement dianggap lebih berkualitas dengan sistem secara elektronik yang menerapkan prinsip – prinsip efisien, efektif, transparan,

terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel. Namun hal ini belumlah optimal karena disisi lain masih banyak masyarakat yang belum tau atau acuh terhadap kebijakan e-Procurement ini, hal ini patut disayangkan karena pada mindset masyarakat masih tertanam bahwa kegiatan pengadaan barang dan jasa masih seperti dulu yang penuh dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

5. Ketepatan Proses

Ketepatan yang terakhir dalam menentukan efektifitas implementai kebijakan adalah ketepatan proses. Tepat proses yakni kesesuaian antara kebijakan dengan proses implementasi dilapangan, yang terdiri dari 2 indikator yaitu kesiapan pelaksana menjalankan kebijaksanaan dan kesiapan publik melaksanakan atau menjadi bagian dari kebijaksanaan.

Dari data penelitian dilapangan menunjukkan bahwa kesiapan pelaksana menjalankan kebijakan e-Procurement di Universitas Diponegoro belum optimal, dimana masih terdapat kekurangan. Kekurangan yang dimaksud adalah seperti kurangnya staff sumber daya manusia dalam mendukung proses implementasi e-Procurement, dan kekurangan fasilitas penunjang lain seperti genset/ups sebagai generator listrik cadangan apabila terjadi pemadaman. Selanjutnya mengenai kesiapan penyedia jasa untuk melaksanakan atau menjadi bagian dari kebijakan e-Procurement dinilai belum optimal karena dianggap menyusahkan dan karena tidak meratanya pembangunan infrastruktur.

B. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi e-Procurement Di Universitas Diponegoro

1. Komunikasi

Dalam implementasi e-Procurement di Universitas Diponegoro

ada 3 indikator dalam komunikasi yaitu (a) kejelasan (b) konsistensi (c) transmisi atau penyampaian pesan.

Dari hasil penelitian dilapangan diketahui bahwa kejelasan informasi sudah cukup baik misalnya mengenai paket pekerjaan, lokasi pekerjaan, nilai total HPS, persyaratan peserta seperti izin usaha, kualifikasi bidang. Selanjutnya mengenai konsistensi diketahui bahwa informasi yang diberikan telah dilakukan secara konsisten. Dimulai dari adanya pengumuman tender, proses lelang, aanwizing, sampai pengumuman pemenang lelang selalu diberitahu kepada peserta lelang yang ikut. Dan terakhir mengenai penyampaian informasi mengenai kebijakan e-Procurement ini terbagi atas 2 hal yakni penyampaian secara lisan dan melalui sistem elektronik

2. Sumberdaya

Pada kebijakan e-Procurement di Universitas Diponegoro sumber daya tidak akan dapat terlaksana jika tidak ada sumber daya, sumber daya tersebut adalah (a) sumber daya manusia yang berkualitas (b) kuantita sumber daya yang terpenuhi (c) informasi (d) fasilitas.

Dari penelitian di lapangan mengenai sumber daya diketahui bahwa rata rata aktor pelaksana kebijakan e-Procurement memiliki tingkat pendidikan S-1 dan wajib untuk mengikuti diklat pelatihan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sementara bagi Pokja diwajibkan memiliki sertifikat keahlian dalam bidang pengadaan barang dan jasa. Tentunya itu semua dilakukan guna membuat proses kebijakan e-Procurement dapat berjalan dengan lancar sehingga memang perlu orang – orang sesuai dengan klasifikasinya. Selanjutnya mengenai kuantitas sumber daya manusia, dari hasil penelitian dilapangan diketahui bahwa implementasi e-Procurement di Universitas Diponegoro mengalami

kekurangan sumber daya manusia dimana hanya terdapat 3 staff di LPSE dan seorang ketua di ULP, tentunya ini jauh dari kata cukup. Sehingga mengakibatkan pada proses implementasi e-Procurementnya menjadi belum maksimal. Selanjutnya mengenai informasi telah cukup baik berjalan mulai dari KPA yaitu Rektor hingga kepada LPSE dan ULP. Terakhir mengenai fasilitas, dari penelitian dilapangan diketahui bahwa fasilitas sebagai sarana penunjang pelaksanaan e-Procurement di Universitas Diponegoro belumlah optimal. Hal ini diketahui ketika peneliti melakukan survey yang kebetulan terjadi pemadaman, yang terjadi adalah matinya komputer pendukung bagi staff dalam menjalankan e-Procurement. Genset hanya tersedia bagi server agar data tidak hilang, sementara genset bagi proses administrasi e-Procurement tidak disediakan yang berakibat terhentinya pelaksanaan e-Procurement saat itu.

3. Disposisi

Pada pelaksanaan kebijakan e-Procurement ini melihat disposisi menjadi beberapa aspek yaitu (a) komitmen (b) kejujuran (c) tingkat demokratis. Pertama, komitmen. Dalam menjalankan suatu kebijakan dituntut para aktor pelaksana kebijakan mempunyai komitmen yang kuat terhadap kebijakan yang dijalankannya, dengan komitmen adalah modal untuk pelaksanaan yang sungguh sungguh profesional. Pada pelaksanaan e-Procurement di Universitas Diponegoro diketahui bahwa para implementor mempunyai komitmen terhadap suksesnya kebijakan e-Procurement. Komitmen ditandai dengan aktifnya mereka terhadap keluhan atau tanggapan dari para penyedia jasa, sebisa mungkin para implementor mencarikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi peserta lelang. Selanjutnya kejujuran, Dari hasil penelitian dilapangan diketahui bahwa kejujuran implementor pada kebijakan e-Procurement di

Universitas Diponegoro adalah baik, karena memang sedikit jumlah staff sehingga memudahkan pengawasan apabila ada pegawai yang bertindak nakal. Selanjutnya juga ada sanksi pidana jika terbukti secara hukum melakukan kecurangan untuk menguntungkan atau merugikan seseorang atau sebuah lembaga dalam proses pengadaan barang dan jasa. Terakhir tingkat demokratis, dari hasil penelitian dilapangan diketahui bahwa berjalannya sikap demokrasi para impementor kebijakan e-Procurement di Universitas Diponegoro, dimana para impelementor akan memberikan akses kepada pihak pihak yang tidak puas terhadap hasil keputusan lelang, karena para implementor memegang teguh prinsip netralitas. Selain itu pegawai pun diberikan hak untuk mengeluarkan pendapat pada pengawasan internal jika merasa dibutuhkan sehingga tercipta sistem demokrasi yang baik pada pelaksanaan kebijakan e-Procurement.

4. Karakteristik Agen Pelaksana

Dalam faktor struktur birokrasi ada 2 hal yang berpengaruh yaitu (a) standar operasional prosedur (b) fragmentasi. Pertama, standar operasional prosedur. Pada pengimplementasian kebijakan e-Procurement di Universitas Diponegoro diketahui bahwa standar operasional prosedur telah berjalan sebagaimana mestinya. Kedua Fragmentasi. Fragmentasi atau pembagian struktur birokrasi pada pengimpelementasian kebijakan e-Procurement di Universitas Diponegoro telah terbentuk namun belum optimal dalam penerapannya. Menjadi tidak maksimal karena meskipun telah terbentuk struktur birokrasi dalam kebijakan e-Procurement seperti, ULP, LPSE, Pokja, PPK namun masih kekurangan aktor pelaksana. Hal ini dapat diketahui dari hasil penelitian dilapangan yang mengungkapkan bahwa di Universitas Diponegoro hanya ada 4 orang

untuk 2 lembaga, yakni ULP dan LPSE, yakni ketua ULP dijabat oleh Bapak Hery Suliantoro, ketua LPSE oleh Bapak Zainal Fanani, kemudian 2 orang staff yang merangkap staff ULP dan LPSE yakni Mas Aun dan mbak Rina. Tentu pembagian struktur birokrasi seperti ini menjadikan implementasi kebijakan diponegoro menjadi tidak optimal.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kondisi Implementasi e-Procurement di Universitas Diponegoro

Kondisi implementasi kebijakan e-Procurement di Universitas Diponegoro belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Walaupun sudah diterapkannya aturan mengenai penyelenggaraan e-Procurement nyatanya kondisi di LPSE dan ULP masih terdapat kekurangan dalam implementasinya.

Apabila dilihat dari ketepatan kebijakan e-Procurement memang sudah mampu menjawab persoalan mengenai pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sebelum dikeluarkan kebijakan e-Procurement,

Namun jika melihat dari segi ketetapan pelaksanaan maka pada implementasi e-Procurement di Universitas Diponegoro masih belum optimal terlihat dari minimnya pengetahuan dan pemahaman dari penyedia jasa mengenai pihak pihak yang menjadi implementor dalam kebijakan e-Procurement.

Melihat dari Ketepatan Target yang ingin dicapai sudah tepat namun belum optimal dalam implementasinya, hal ini disebabkan masih banyaknya trouble dalam program kebijakan e-Procurement seperti server error, gangguan internet sehingga menyulitkan proses lelang.

Dari segi lingkungan belum berjalan secara maksimal, hal ini ditunjukkan dari persepsi dari lingkungan luar yaitu publik. Publik atau masyarakat masih banyak yang belum mengerti dan acuh terhadap kegiatan pengadaan barang secara elektronik.

Terakhir dilihat dari segi Ketepatan proses pada implementasi e-Procurement masih belum optimal baik dari aktor implementor maupun pada kelompok sasaran. Hal ini disebabkan kesiapan yang belum maksimal dari penyedia jasa mengenai perangkat pendukungnya seperti infrastruktur.

Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi e-Procurement di Universitas Diponegoro

Faktor pendukung terlaksananya implementor di Universitas Diponegoro adalah faktor komunikasi, yang mana telah berjalan dengan cukup baik, dimana terdapat kejelasan informasi mengenai waktu pelaksanaan lelang yaitu kapan, dimana, dan jenis lelang apa yang tersedia, konsistensi komunikasi juga berjalan dengan baik, dan transformasi penyampaian komunikasi yang baik melalui lisan, melalui email, ataupun melalui website mengenai pengadaan barang dan jasa. Faktor pendukung terlaksana implementasi selanjutnya adalah Faktor Disposisi. Faktor Disposisi yang terjalin pada implementasi e-Procurement sudah baik, dapat dilihat dari sikap implementor yang aktif dan tanggap mendukung kebijakan. Ditambah dengan komitmen yang baik dari para implementor agar kebijakan pengadaan barang dan jasa dapat berjalan dengan transparan, efisien dan akuntabel.

Faktor penghambat dalam implementor di Universitas Diponegoro adalah Faktor Sumber Daya, Berdasarkan Faktor Sumber

Daya implemmentasi e-Procurement masih jauh dari kata optimal. Hal ini dapat dinilai dari aspek kurangnya sumber daya manusia untuk menjalankan kebijakan e-Procurement dimana hanya terdapat Ketua LPSE, Ketua ULP, dan hanya 2 staff pegawai, tentulah ini jauh dari kata cukup. Selain itu fasilitas pendukung seperti genset/ups juga tidak tersedia padahal ini penting untuk mengantisipasi keadaan darurat seperti pemadaman yang kadang terjadi. Faktor penghambat implementasi e-Procurement berikutnya adalah Faktor Struktur Birokrasi yang ada pada lembaga LPSE dan ULP dalam kebijakan e-Procurement. Struktur birokrasi pada LPSE dan ULP menjadi belum optimal adalah akibat dari kurangnya sumber daya manusia sebagai implementor dilapangan sehingga terjadi overlapping tugas atau tumpang tindih karena aktor pelaksana merangkap tugasnya, dimana hanya terdapat 2 staff pegawai yang merangkap staff LPSE sekaligus staff ULP

B. SARAN

1. Minimnya pengetahuan penyedia jasa mengenai aktor e-Procurement.

Aktor pelaksana dalam implementasi e-Procurement umumnya hanya diketahui sebagai LPSE dan ULP padahal lebih dari itu ada KPA, PPK, dan LKPP. Oleh sebab minimnya pengetahuan penyedia jasa tersebut maka perlu ada solusi mengenalkan penyedia jasa dengan semua lembaga yang terlibat e-Procurement dengan cara melakukan sosialisasi kepada para penyedia jasa dan kepada asosiasi pengusaha, serta dapat pula dibentuk buku petunjuk teknis mengenai pelaksanaan e-Procurement

2. Kesulitan mengupload dokumen pada saat lelang

Perlu dilakukannya *maintenance* atau perawatan secara berkala pada hardware dan melakukan *upgrade* secara berkala pada software sistem pengadaan secara elektronik ke versi terbaru, Selain

itu diusulkan kepada LKPP agar memperketat keamanan piranti lunak atau software dalam sistem pengadaan secara elektronik, untuk mengantisipasi bahaya dari kejahatan dunia maya atau cyber crime mengingat sensitifnya data pengadaan barang dan jasa.

3. Masih buruknya pandangan/opini publik mengenai pengadaan

Berdasarkan kenyataan dilapangan bahwa dengan implementasi e-Procurement terjadi perubahan – perubahan ke arah yang lebih baik dalam pengadaan barang dan jasa seperti semakin menurunnya kasus korupsi dibanding pada sistem pengadaan secara manual harusnya menyadarkan publik bahwa keadaan telah berubah, usulan perlu dilakukan publikasi kinerja dan transparansi lembaga pengadaan ke pada publik dan turut serta mengajak publik sebagai bagian untuk mengawasi proses pengadaan barang dan jasa.

4. Infrastruktur yang belum mendukung

Infrastuktur dalam pengadaan barang dan jasa secara elektronik berperan besar untuk menciptakan pasar yang luas dan persaingan yang sehat. Korelasinya adalah apabila tersedia infrastuktur yang baik tidak hanya di pulau Jawa saja seperti jaringan internet, listrik, dan komputer pada tiap tiap pulau seperti Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, maka akan menumbuhkan penyedia jasa – penyedia jasa yang lain. Dengan begitu tercipta pasar yang luas dan persaingan yang sehat karena semakin kompetitif dengan banyaknya penyedia jasa.

5. Sumber Daya

Perlu adanya penambahan staff pegawai dalam pelaksanaan implementasi e-Procurement. Penambahan staff pegawai tersebut dilakukan dengan cara merekrut pegawai baru dan mengubah status staff yang sebelumnya volunteer menjadi pegawai tetap. Selain sumber daya manusia, perlu diusulkan adanya fasilitas penunjang pelaksanaan kegiatan e-

Procurement seperti genset/ups untuk mengantisipasi terjadinya pemadaman.

6. Struktur Birokrasi

Diusulkan untuk melakukan pembenahan pada jobsdesk (pembagian tugas) yang diberikan kepada pegawai, agar tugas yang ditanggung tidak membebani implemendor yang berakibat buruk pada rendahnya produktifitasnya dalam pekerjaan

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Muhadjir, Noeng. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Rake Sarasin

Moleong, J Lexy. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Nawawi, Ismail. 2007. Public Policy Analisis, Strategi Advokasi Teori Dan Praktek. Surabaya: PMN

Nugroho, Riant. (2011). Public Policy. Jakarta: PT. Alex Media Komputindo

Pasolong, Harbani. 2008. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta

Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia. Yogyakarta: Gava Media

Subarsono, A.G. 2005. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Utama

Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta

Suwitri, Sri. 2011. Konsep Dasar Kebijakan Publik. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang

Syafiie, Inu Kencana. 2006. Ilmu Administrasi Publik. Jakarta: Rineka Cipta

Wahab, Solichin Abdul. 2005. Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: PT Bumi Aksara

Winarno, Budi. 2012, Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus). Yogyakarta: CAPS

Skripsi dan Tesis :

Ardian,Rizky.(2013). Implementasi pelaksanaan electronic procurement dengan prinsip-prinsip Good Governance di Dinas Bina Marga Provinsi Jawa tengah.Skripsi. Universitas Diponegoro

Dewi, Siska Setiya.(2014). Implementasi kebijakan e-Procurement di Kabupaten Wonogiri.Skripsi. Universitas Diponegoro

Media Massa :

Pengertian e-Procurement. Dalam <https://en.wikipedia.org/wiki/E-procurement>. Diunduh pada tanggal 10 April 2015 Pukul 19.30

Indonesia Corruption Watch.(2013). Dalam www.beritasatu.com (24/3/2013). Diunduh pada tanggal 26 Mei 2015 Pukul 21.00

Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran.(2014). Dalam www.gresnews.com (29/6/2014).

Diunduh pada tanggal 26 Mei 2015 Pukul
22.30

Manfaat e-Procurement (2011). Dalam
www.pusatlpse.kemenkeu.go.id. Di
unduh pada tanggal 27 Mei 15.00

Peraturan :

Instruksi Presiden No 6 Tahun 2001
tentang pengembangan dan
pemberdayagunaan telematika

Instruksi Presiden No 3 Tahun 2003
tentang kebijakan dan strategi
nasional pengembangan e-
Government

Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010
tentang pengadaan barang dan jasa
pemerintah